Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

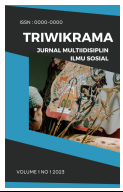

PERAN JOKOWI SEBAGAI 'KING MAKER' DALAM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA 2024: ANALISIS STRATEGI POLITIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONSTELASI POLITIK NASIONAL

Oxana Putri Fieda
Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:
Received Agustus 2024
Revised Agustus 2024
Accepted Agustus 2024
Available online Agustus 2024

Korespondensi:
Oxana.fieda@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 'king maker' dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024 dan dampaknya terhadap konstelasi politik nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi strategi politik Jokowi, manifestasi perannya sebagai 'king maker', serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa strategi politik pragmatis dan populis Jokowi, serta pengaruhnya yang kuat dalam dinamika partai politik, telah mengubah lanskap politik Indonesia secara signifikan. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas proses demokratisasi di negara berkembang, di mana personalisasi politik masih berperan penting. Meskipun dapat dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan, peran Jokowi sebagai 'king maker' juga menimbulkan tantangan terhadap konsolidasi demokrasi, terutama dalam hal penguatan institusi dan sirkulasi elit. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika demokrasi presidensial di negara berkembang dan menegaskan pentingnya memahami interaksi kompleks antara faktor institusional, kultural, dan personal dalam proses demokratisasi.

Kata kunci: Jokowi, King Maker, Demokrasi Indonesia, Personalisasi Politik, Transisi Demokrasi

Abstract

This research analyzes President Joko Widodo's (Jokowi) role as a 'kingmaker' in the 2024 Indonesian Presidential Election and its impact on the national political constellation. Using a qualitative approach with library research methods, this study explores Jokowi's political strategies, the manifestation of his role as a kingmaker, and its implications for the quality of Indonesian democracy. The findings show that Jokowi's pragmatic and populist political strategies, as well as his strong influence on party dynamics, have significantly altered Indonesia's political landscape. This phenomenon reflects the complexity of the democratization process in developing countries, where the personalization of politics still plays a crucial role. While it can be seen as an effort to maintain stability and continuity of development, Jokowi's role as a kingmaker also poses challenges to democratic consolidation, especially in terms of strengthening institutions and elite circulation. This research contributes to the understanding of presidential democratic dynamics in developing countries and emphasizes the importance of comprehending the complex interactions between institutional, cultural, and personal factors in the democratization process.

Keywords: Jokowi, kingmaker, Indonesian democracy, personalization of politics, democratic transition

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

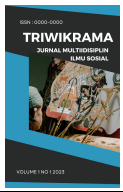

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 menjadi titik krusial dalam perjalanan demokrasi negara ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan demokrasi terbesar ketiga secara global, Indonesia menghadapi momentum penting yang akan menentukan arah politik dan pembangunan negara untuk lima tahun ke depan. Dalam konteks ini, peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana yang tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi sorotan utama, memunculkan spekulasi tentang posisinya sebagai potential *kingmaker* dalam konstelasi politik nasional (Aspinall & Mietzner, 2019). Istilah 'kingmaker' dalam politik merujuk pada individu atau entitas yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan pemimpin politik, meskipun mereka sendiri tidak memegang jabatan tersebut (SAMUELS, 2002). Dalam konteks Indonesia, peran ini semakin relevan mengingat sistem presidensial yang kuat dan kultur politik yang masih sangat bergantung pada figur. Jokowi, dengan tingkat popularitas yang konsisten tinggi sepanjang dua periode kepemimpinannya, berada dalam posisi unik untuk mempengaruhi preferensi pemilih dan dinamika antar elit politik menjelang Pemilu 2024 (Negara, 2019).

Selama dua periode kepemimpinannya (2014-2024), Jokowi telah membawa Indonesia melalui berbagai pencapaian dan tantangan. Program-program unggulan seperti pembangunan infrastruktur masif, reformasi birokrasi, dan upaya pemberantasan korupsi telah membentuk legasi politiknya. Namun, kritik juga muncul terkait isu-isu seperti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pandemi COVID-19, dan kebijakan lingkungan yang kontroversial seperti pemindahan ibu kota negara (Prayudi & Sagita, 2021). Kompleksitas pencapaian dan kontroversi ini membentuk *political capital* Jokowi yang signifikan menjelang akhir masa jabatannya. Dalam konteks *power transition*, periode menjelang Pemilu 2024 menunjukkan dinamika menarik dimana Jokowi, meskipun secara konstitusional tidak dapat mencalonkan diri kembali, tetap menjadi figur sentral dalam percaturan politik. Fenomena ini, yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai *shadow presidency*, menggambarkan situasi dimana presiden petahana mempertahankan pengaruh politiknya bahkan ketika secara formal tidak lagi menjabat (Razita et al., 2024). Hal ini terlihat dari berbagai manuver politik Jokowi, termasuk penempatan tokoh-tokoh kunci di posisi strategis pemerintahan dan partai, serta pernyataan-pernyataan publik yang sering diinterpretasikan sebagai sinyal dukungan terhadap calon tertentu.

Aspek penting lainnya dalam memahami peran Jokowi sebagai potential kingmaker adalah konsep *political endorsement* dan dampaknya terhadap perilaku pemilih di Indonesia. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi yang masih berkembang seperti Indonesia, dukungan dari tokoh politik berpengaruh dapat memiliki efek signifikan terhadap preferensi pemilih (Fossati et al., 2021). Hal ini semakin diperkuat oleh karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung *leader-centric* dalam orientasi politiknya, dimana figur pemimpin seringkali lebih berpengaruh dibandingkan platform partai atau kebijakan (Aspinall & Berenschot, 2019). Dinamika *coalition building* juga menjadi aspek krusial dalam memahami peran Jokowi sebagai kingmaker. Sistem multipartai di Indonesia mengharuskan adanya koalisi untuk mencapai mayoritas di parlemen, dan dalam hal ini, peran Jokowi dalam memfasilitasi atau bahkan mengarahkan pembentukan koalisi menjadi sangat signifikan. Kemampuannya untuk menjembatani berbagai kepentingan politik, yang telah terbukti selama dua periode kepemimpinannya, menjadikannya figur kunci dalam proses negosiasi antar elit politik menjelang Pemilu 2024 (Mietzner, 2018).

Fenomena Jokowi sebagai potential kingmaker juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari transformasi politik Indonesia pasca-Reformasi. Tren *personalization of politics*, dimana figur individu menjadi lebih dominan dibandingkan institusi partai, semakin menguat dalam dua dekade terakhir (Mietzner, 2018). Dalam konteks ini, peran Jokowi tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi dari pergeseran paradigma politik Indonesia yang lebih berorientasi pada figur daripada ideologi atau program partai. Aspek lain yang perlu

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dipertimbangkan adalah konsep *political legacy* dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku presiden petahana menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi, dengan berbagai program ambisius yang telah diinisiasinya, memiliki kepentingan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan-kebijakannya. Hal ini potensial menjadi motivasi kuat baginya untuk berperan aktif dalam menentukan suksesinya, baik melalui dukungan eksplisit maupun implisit terhadap calon tertentu (Asrinaldi & Yusoff, 2023).

Namun, peran Jokowi sebagai kingmaker juga menghadapi tantangan dan batasan. Pertama, dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks dan unpredictable, terutama dengan munculnya generasi pemilih muda atau *Gen Z voters* yang memiliki karakteristik dan preferensi politik berbeda. Kedua, potensi backlash dari publik atau elit politik lain jika peran Jokowi dianggap terlalu dominan dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, faktor eksternal seperti situasi geopolitik dan ekonomi global yang dapat mempengaruhi lanskap politik domestik secara signifikan (Aminuddin, 2023). Dalam konteks yang lebih luas, fenomena Jokowi sebagai potential kingmaker juga merefleksikan dilema klasik dalam studi demokrasi tentang keseimbangan antara stabilitas politik dan sirkulasi elit. Di satu sisi, peran aktif Jokowi dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kebijakan. Di sisi lain, hal ini juga dapat diinterpretasikan sebagai hambatan terhadap proses regenerasi kepemimpinan yang merupakan esensi dari demokrasi (Hadiz & Robison, 2017).

Akhirnya, penting untuk memahami bahwa peran Jokowi sebagai kingmaker bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari narasi yang lebih besar tentang evolusi demokrasi Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi politik Jokowi, dampaknya terhadap konstelasi politik nasional, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus tentang demokratisasi di negara berkembang dan memberikan wawasan baru dalam studi politik komparatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis peran Jokowi sebagai 'kingmaker' dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali makna mendalam dari fenomena sosial-politik yang kompleks, memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan konteks yang mungkin tidak terungkap melalui pendekatan kuantitatif (Gaines, 2023). Dalam konteks ini, studi pustaka menjadi metode yang tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk dokumen resmi, artikel ilmiah, laporan media, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang topik yang diteliti. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber ini akan mencakup, namun tidak terbatas pada, artikel jurnal akademik *peer-reviewed*, buku-buku teks tentang politik Indonesia kontemporer, laporan think tank dan lembaga penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, artikel media massa dari sumber-sumber terpercaya, serta transkrip pidato dan pernyataan publik dari tokoh-tokoh politik kunci, termasuk Presiden Jokowi sendiri. Database elektronik seperti *JSTOR*, *ProQuest*, dan Google Scholar akan digunakan untuk mengakses artikel jurnal, sementara perpustakaan fisik dan digital akan dimanfaatkan untuk mengakses buku-buku dan dokumen yang relevan. Khusus untuk sumber-sumber berbahasa Indonesia, database lokal seperti Indonesia *OneSearch* dan portal jurnal ilmiah Indonesia (GARUDA) akan digunakan untuk memastikan cakupan yang komprehensif terhadap literatur domestik.

Dalam proses analisis data, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dikombinasikan dengan metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Analisis konten kualitatif akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan tren yang muncul dari berbagai sumber literatur

(Schreier, 2011). Sementara itu, analisis wacana kritis akan memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna tersembunyi, konteks sosial-politik, serta relasi kekuasaan yang termanifestasi dalam teks-teks yang dianalisis (Fairclough, 2019). Kombinasi kedua metode ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih nuansir terhadap strategi politik Jokowi, persepsi publik dan elit politik terhadap perannya, serta implikasi yang lebih luas terhadap dinamika politik Indonesia. Untuk memastikan kredibilitas dan keandalan penelitian, beberapa strategi akan diterapkan. Pertama, triangulasi sumber data akan dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber (akademik, media, dokumen resmi) untuk memverifikasi temuan dan mengidentifikasi perbedaan perspektif. Kedua, *peer debriefing* akan dilakukan dengan melibatkan peneliti lain atau pakar di bidang politik Indonesia untuk memberikan masukan kritis terhadap interpretasi data dan kesimpulan penelitian. Ketiga, member checking akan dilakukan dengan cara mempresentasikan temuan awal kepada beberapa informan kunci (jika memungkinkan) untuk memvalidasi akurasi interpretasi peneliti.

Dalam proses analisis, perhatian khusus akan diberikan pada konteks historis dan sosio-politik Indonesia. Ini termasuk mempertimbangkan latar belakang Reformasi 1998, evolusi sistem pemilu dan partai politik di Indonesia, serta dinamika hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem presidensial Indonesia. Analisis juga akan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti pengaruh media sosial, peran *civil society*, dan dinamika politik lokal yang mungkin mempengaruhi peran Jokowi sebagai *kingmaker*. Penelitian ini juga akan menerapkan pendekatan komparatif dalam analisisnya. Peran Jokowi akan dibandingkan dengan presiden-presiden Indonesia sebelumnya, serta dengan fenomena serupa di negara-negara demokrasi lain, terutama di kawasan Asia Tenggara. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi keunikan kasus Indonesia serta menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dari studi tentang transisi kekuasaan dalam demokrasi berkembang.

Akhirnya, penelitian ini akan menerapkan prinsip refleksivitas, di mana peneliti secara aktif menyadari dan mengakui potensi bias dan asumsi pribadi yang mungkin mempengaruhi interpretasi data. Hal ini penting mengingat sensitivitas topik politik dan potensi perbedaan interpretasi yang mungkin muncul. Dengan menerapkan prinsip ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan analisis yang seimbang dan obyektif, sembari tetap mengakui batasan-batasan inherent dalam penelitian kualitatif. Melalui pendekatan metodologis yang komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan nuansir tentang peran Jokowi sebagai *kingmaker* dalam konteks Pemilihan Presiden Indonesia 2024, serta implikasinya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Strategi Politik Jokowi Menjelang Pemilu 2024

A. Positioning Politik Jokowi

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan strategi politik yang sangat cerdik dan pragmatis. Meskipun secara konstitusional tidak dapat mencalonkan diri kembali, Jokowi tetap menjadi figur sentral dalam percaturan politik nasional. Positioning politiknya dapat dilihat dari dua aspek utama: retorika dan narasi publik, serta kebijakan-kebijakan strategis di akhir masa jabatannya. Dalam hal retorika dan narasi publik, Jokowi secara konsisten mempertahankan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ia terus melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mempertahankan gaya komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, berbeda dengan periode sebelumnya, Jokowi mulai membangun narasi tentang kontinuitas pembangunan dan pentingnya menjaga stabilitas politik. Ia sering menekankan pentingnya melanjutkan program-program yang telah diinisiasi selama kepemimpinannya, terutama dalam hal infrastruktur dan reformasi birokrasi. Kebijakan-kebijakan strategis Jokowi di akhir masa jabatannya juga menunjukkan upaya untuk mempengaruhi lanskap politik menjelang Pemilu 2024. Beberapa kebijakan kontroversial diambil, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT),

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Meskipun menuai kritik, langkah-langkah ini dapat dilihat sebagai upaya Jokowi untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang dan memperkuat posisi tawar politiknya. Selain itu, kebijakan seperti perpanjangan kontrak PT Freeport dan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan menunjukkan upaya Jokowi untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok politik dan ekonomi.

B. Manajemen Koalisi dan Partai

Dalam hal manajemen koalisi dan partai, Jokowi menunjukkan keahlian politik yang luar biasa. Ia berhasil melakukan restrukturisasi koalisi pemerintah dengan cara yang mengejutkan banyak pihak. Meskipun berasal dari PDI-P, Jokowi secara perlahan membangun basis dukungan yang lebih luas dan beragam. Ia berhasil menarik partai-partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi, seperti Partai Gerindra, ke dalam lingkaran kekuasaannya. Jokowi juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam dinamika internal partai-partai pendukungnya. Meskipun tidak secara langsung mencampuri urusan internal partai, keputusan-keputusan politiknya seringkali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan partai-partai koalisi. Hal ini terlihat jelas dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, di mana preferensi Jokowi menjadi pertimbangan utama bagi banyak partai.

C. Penggunaan Sumber Daya Kepresidenan

Jokowi juga sangat lihai dalam memanfaatkan sumber daya kepresidenan untuk mempengaruhi dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Program-program pemerintah, seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, secara tidak langsung digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dukungan publik. Meskipun tidak secara eksplisit dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu, timing dan cara implementasi program-program ini seringkali memiliki implikasi politik yang signifikan. Penempatan tokoh-tokoh kunci di posisi strategis juga menjadi strategi penting Jokowi. Ia menempatkan orang-orang kepercayaannya di berbagai pos penting, baik di kabinet, lembaga negara, maupun BUMN. Langkah ini tidak hanya memperkuat kontrol Jokowi atas birokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya akan terus dilanjutkan bahkan setelah masa jabatannya berakhir.

Jokowi sebagai 'King Maker': Manifestasi dan Implikasi

A. Indikator Peran 'King Maker'

Peran Jokowi sebagai 'king maker' dalam Pemilu 2024 semakin jelas terlihat menjelang masa akhir jabatannya. Meskipun tidak secara resmi mendukung kandidat tertentu, Jokowi memberikan sinyal-sinyal politik yang kuat melalui pernyataan dan tindakannya. Dukungan implisitnya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terlihat dari berbagai gestur politik dan kebijakan yang diambilnya. Pengaruh Jokowi dalam proses pencalonan di partai-partai besar juga sangat signifikan. Meskipun bukan ketua umum partai, keputusan-keputusan Jokowi seringkali menjadi faktor penentu dalam dinamika internal partai-partai politik, terutama dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya posisi Jokowi sebagai 'king maker' dalam konstelasi politik nasional.

B. Respon Elit Politik dan Publik

Peran Jokowi sebagai 'king maker' memicu beragam respon dari elit politik dan publik. Para calon presiden harus menyesuaikan strategi kampanye mereka dengan mempertimbangkan posisi dan preferensi Jokowi. Beberapa kandidat berusaha mendekatkan diri dan mendapatkan dukungan dari Jokowi, sementara yang lain memilih untuk mengambil jarak dan membangun narasi alternatif. Persepsi publik terhadap peran Jokowi juga beragam. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan, sementara

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

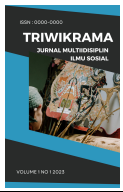

yang lain mengkhawatirkan potensi pelemahan demokrasi dan munculnya politik dinasti. Perdebatan ini mewarnai diskursus publik menjelang Pemilu 2024, menunjukkan betapa sentralnya posisi Jokowi dalam lanskap politik Indonesia.

C. Dampak terhadap Dinamika Kampanye

Peran Jokowi sebagai 'king maker' membawa dampak signifikan terhadap dinamika kampanye Pemilu 2024. Terjadi pergeseran isu dan narasi kampanye, di mana kontinuitas kebijakan Jokowi menjadi tema sentral. Kandidat yang dianggap dekat dengan Jokowi menekankan pentingnya melanjutkan program-program pembangunan, sementara kandidat lain berusaha menawarkan alternatif dan perubahan. Pembentukan dan perpecahan koalisi juga sangat dipengaruhi oleh posisi Jokowi. Partai-partai politik harus mempertimbangkan dengan cermat apakah akan bergabung dengan koalisi yang didukung Jokowi atau memilih untuk berada di luar lingkaran kekuasaannya. Hal ini mengakibatkan dinamika koalisi yang cair dan seringkali berubah-ubah menjelang Pemilu 2024. Secara keseluruhan, strategi politik Jokowi menjelang Pemilu 2024 dan perannya sebagai 'king maker' telah mengubah lanskap politik Indonesia secara signifikan. Kemampuannya untuk memainkan berbagai kepentingan politik, mempertahankan citra publik yang positif, dan mempengaruhi dinamika internal partai-partai politik menunjukkan keahlian politik yang luar biasa. Namun, peran ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang masa depan demokrasi Indonesia dan potensi munculnya politik dinasti. Terlepas dari pro dan kontra, tidak dapat dipungkiri bahwa Jokowi telah menjadi salah satu figur politik paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia.

Dampak terhadap Konstelasi Politik Nasional

A. Pergeseran Peta Kekuatan Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah telah mengakibatkan pergeseran signifikan dalam peta kekuatan politik di Indonesia. Perubahan ini berpotensi menciptakan realignment partai-partai politik dan memunculkan aktor-aktor politik baru dalam kancah Pilkada. Realignment partai-partai politik terlihat dari penyesuaian strategi yang harus dilakukan pasca putusan MK. Sebagaimana diungkapkan oleh Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, "Parpol-parpol dapat menyusun ulang strategi. Peta kekuatan politik di pilkada akan berubah (Kompas.com) . Perubahan ambang batas pencalonan memungkinkan partai-partai kecil dan menengah untuk berpartisipasi lebih aktif dalam Pilkada tanpa harus selalu berkoalisi dengan partai besar. Hal ini berpotensi menciptakan dinamika baru dalam pembentukan aliansi politik. Munculnya aktor-aktor politik baru juga menjadi konsekuensi logis dari perubahan regulasi ini. Putusan MK membuka peluang lebih besar bagi figur-figur potensial yang sebelumnya terhambat oleh sistem pencalonan yang lebih rigid. Contohnya, kasus Anies Baswedan yang kini memiliki peluang untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024, meskipun partai pendukungnya tidak memenuhi syarat pencalonan sebelumnya (Kompas.com) . Fenomena ini berpotensi memperkaya kontestasi politik dengan hadirnya pemimpin-pemimpin baru yang mungkin membawa perspektif dan pendekatan berbeda dalam pemerintahan daerah.

B. Transformasi Lanskap Media dan Opini Publik

Pergeseran peta politik ini juga berdampak pada transformasi lanskap media dan opini publik. Peran media sosial dan buzzer politik semakin signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap kandidat dan isu-isu politik. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen yang diberikan, dapat diasumsikan bahwa perubahan regulasi Pilkada akan meningkatkan intensitas kampanye digital dan aktivitas buzzer politik. Polarisasi opini publik juga menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Dengan semakin beragamnya kandidat dan platform politik yang muncul, masyarakat cenderung terpolarisasi dalam mendukung figur atau kebijakan tertentu. Fenomena ini berpotensi mempertajam fragmentasi sosial-politik yang sudah ada sebelumnya.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

C. Pengaruh terhadap Institusi Demokrasi

Putusan MK ini juga memiliki implikasi signifikan terhadap institusi demokrasi di Indonesia. Independensi lembaga-lembaga negara, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), mendapat sorotan. Ray Rangkuti menekankan pentingnya KPU untuk segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) sesuai dengan putusan MK, dengan menyatakan, "Lima Indonesia tidak menemukan alasan yang kuat untuk tidak segera memasukan poin putusan MK ini ke dalam PKPU" (Kompas.com) . Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap KPU untuk bertindak cepat dan responsif terhadap dinamika hukum dan politik yang berkembang. Tantangan terhadap prinsip checks and balances juga menjadi perhatian serius. Perubahan regulasi Pilkada berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Dengan memungkinkan lebih banyak partai untuk mencalonkan kepala daerah secara independen, dinamika politik lokal mungkin akan lebih kompleks dan membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Lebih lanjut, putusan MK ini juga menguji fleksibilitas dan adaptabilitas sistem demokrasi Indonesia. Kemampuan lembaga-lembaga negara untuk merespons perubahan regulasi dengan cepat dan efektif akan menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi di negara ini. Ray Rangkuti memperingatkan bahwa keterlambatan KPU dalam mengadopsi putusan MK bisa berakibat pada pelanggaran etik dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu (Kompas.com) . Kesimpulannya, putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah telah menciptakan gelombang perubahan yang signifikan dalam konstelasi politik nasional Indonesia. Pergeseran peta kekuatan politik, transformasi lanskap media dan opini publik, serta pengaruhnya terhadap institusi demokrasi merupakan aspek-aspek krusial yang perlu diperhatikan dan diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Analisis Komparatif: Jokowi dan Presiden Sebelumnya

Untuk memberikan analisis komparatif yang komprehensif dan spesifik antara Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, saya akan menyajikan informasi dalam bentuk tabel yang mencakup berbagai aspek penting dari kepemimpinan mereka. Tabel ini akan membandingkan era Jokowi dengan Era Reformasi (Habibie, Gus Dur, Megawati), Era Orde Baru (Soeharto), dan Era SBY.

Aspek	Era Reformasi (Habibie, Gus Dur, Megawati)	Era SBY	Era Jokowi	Era Orde Baru (Soeharto)
Gaya Kepemimpinan	- Habibie: Teknokrat, reformis - Gus Dur: Pluralis, informal - Megawati: Nasionalis, low-profile	Demokratis, konsensus	Pragmatis, populis	Otoriter, sentralistik
Kebijakan Ekonomi	Liberalisasi ekonomi, reformasi struktural	Stabilitas makroekonomi, peningkatan investasi	Fokus pada infrastruktur, deregulasi	Pembangunan ekonomi terpusat
Hubungan dengan Militer	Pengurangan peran militer dalam politik	Reformasi militer berlanjut	Peningkatan peran TNI dalam pembangunan	Dwifungsi ABRI

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Politik Luar Negeri	Normalisasi hubungan internasional	Thousand friends, zero enemy	Poros maritim dunia, diplomasi ekonomi	Non-blok, fokus regional
Pendekatan terhadap Korupsi	Pembentukan KPK (Era Megawati)	Penguatan KPK	Kontroversi pelemahan KPK	Korupsi sistemik
Desentralisasi	Implementasi otonomi daerah	Penguatan otonomi daerah	Sentralisasi selektif	Sentralisasi kekuasaan
Media dan Kebebasan Pers	Liberalisasi media	Kebebasan pers meningkat	Tantangan baru era digital	Kontrol ketat terhadap media
Penanganan Konflik	- Habibie: Referendum Timor Timur - Gus Dur: Dialog dengan GAM - Megawati: Operasi militer di Aceh	Penyelesaian konflik Aceh	Pendekatan kesejahteraan di Papua	Pendekatan militeristik
Kebijakan Pendidikan	Reformasi kurikulum	Program BOS, sertifikasi guru	Fokus pada pendidikan vokasi	Pendidikan untuk pembangunan
Peran dalam Suksesi	Relatif netral	Relatif netral	Dugaan peran aktif sebagai 'king maker'	Penunjukan langsung

Tabel ini menunjukkan perbedaan signifikan antara era Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya dalam berbagai aspek pemerintahan. Beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi:

1. Gaya Kepemimpinan: Jokowi menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis dan populis dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, yang cenderung lebih ideologis atau formal.
2. Kebijakan Ekonomi: Fokus Jokowi pada pembangunan infrastruktur dan deregulasi berbeda dengan pendekatan presiden sebelumnya, yang lebih menekankan pada stabilitas makroekonomi atau reformasi struktural.
3. Hubungan dengan Militer: Era Jokowi menunjukkan kecenderungan peningkatan peran TNI dalam pembangunan, berbeda dengan era reformasi yang fokus pada pengurangan peran militer dalam politik.
4. Pendekatan terhadap Korupsi: Kontroversi pelemahan KPK di era Jokowi kontras dengan penguatan lembaga anti-korupsi di era-era sebelumnya.
5. Peran dalam Suksesi: Dugaan peran aktif Jokowi sebagai 'king maker' berbeda signifikan dengan presiden-presiden era reformasi yang cenderung lebih netral dalam proses suksesi.

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa era Jokowi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari era-era sebelumnya. Pendekatan pragmatis dan populisnya, fokus pada pembangunan infrastruktur, serta dugaan perannya sebagai 'king maker' dalam proses suksesi merupakan aspek-aspek yang perlu dicermati lebih lanjut dalam konteks dinamika politik Indonesia kontemporer.

Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

A. Penguatan vs Pelemahan Institusi Demokrasi

Peran Jokowi sebagai 'king maker' dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024 memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan atau pelemahan institusi demokrasi. Dalam hal dampak pada proses elektoral, peran aktif Jokowi berpotensi mempengaruhi netralitas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Sebagaimana diargumentasikan oleh Aspinall dan Mietzner (2019), keterlibatan presiden petahana dalam proses suksesi dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan keputusan politik Jokowi yang secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada kandidat tertentu. Pengaruh terhadap kebebasan sipil dan politik juga menjadi sorotan penting. Meskipun secara formal Indonesia masih mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, beberapa pengamat seperti Power (2018) menunjukkan adanya tren pelemahan ruang kebebasan sipil selama periode kedua pemerintahan Jokowi. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan kontroversial seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja yang dianggap membatasi ruang gerak masyarakat sipil dan serikat pekerja. Namun, di sisi lain, Jokowi juga menunjukkan komitmen untuk memperkuat beberapa aspek demokrasi, seperti upaya digitalisasi proses pemilu yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Tapsell, 2021).

B. Tantangan Konsolidasi Demokrasi

Isu personalisme dalam politik Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam konsolidasi demokrasi. Fenomena Jokowi sebagai 'king maker' merefleksikan kuatnya politik berbasis figur di Indonesia. Sebagaimana diargumentasikan oleh Hadiz dan Robison (2017), personalisme politik dapat mengancam institusionalisasi demokrasi dengan melemahkan peran partai politik sebagai saluran aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, preferensi politik Jokowi seringkali menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan platform atau ideologi partai dalam proses pengambilan keputusan politik. Dilema antara stabilitas dan sirkulasi elit juga menjadi isu krusial. Di satu sisi, peran Jokowi dalam mempengaruhi suksesi dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kebijakan. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Mietzner (2020), hal ini juga berpotensi menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang merupakan esensi dari demokrasi. Tantangan ini semakin kompleks mengingat konteks Indonesia sebagai demokrasi yang masih dalam proses konsolidasi, di mana keseimbangan antara stabilitas dan perubahan menjadi sangat penting.

C. Prospek Demokrasi Pasca-Jokowi

Analisis terhadap skenario-skenario potensial perkembangan demokrasi pasca-Jokowi menunjukkan beberapa kemungkinan. Skenario optimis melihat bahwa peran Jokowi sebagai 'king maker' dapat menjadi katalis untuk penguatan institusi demokrasi, dengan asumsi bahwa penerusnya akan melanjutkan dan menyempurnakan reformasi yang telah dimulai. Skenario pesimis, di sisi lain, memperingatkan tentang risiko stagnasi atau bahkan kemunduran demokrasi jika pola personalisme politik terus menguat (Warburton, 2020). Rekomendasi untuk penguatan sistem demokratis mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, pentingnya memperkuat independensi lembaga-lembaga negara, terutama yang terkait dengan proses elektoral. Kedua, revitalisasi peran partai politik sebagai saluran aspirasi masyarakat dan wadah kaderisasi pemimpin. Ketiga, penguatan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses politik. Keempat, reformasi sistem pemilu untuk memastikan kompetisi yang lebih adil dan representatif (Fossati et al., 2021).

Refleksi Teoretis: Jokowi sebagai 'King Maker' dalam Konteks Studi Demokrasi

A. Kontribusi terhadap Teori Transisi Demokrasi

Fenomena Jokowi sebagai 'king maker' memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori transisi demokrasi, khususnya dalam konteks negara pasca-otoritarian.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 4 No 9 Tahun 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

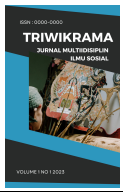

Kasus Indonesia menunjukkan kompleksitas proses demokratisasi yang tidak selalu linear. Sebagaimana diargumentasikan oleh (Dewa et al., 2020), peran aktif presiden petahana dalam proses suksesi menantang asumsi-asumsi klasik tentang konsolidasi demokrasi yang umumnya menekankan pada penguatan institusi dan depersonalisasi politik. Teori transisi demokrasi perlu mempertimbangkan faktor kontinuitas dan perubahan dalam konteks lokal. Kasus Jokowi menunjukkan bahwa dalam demokrasi yang masih berkembang, figur pemimpin dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan transisi, baik sebagai katalis perubahan maupun sebagai penjaga stabilitas. Hal ini sejalan dengan argumen (Kristal, 2021) yang menekankan pentingnya memahami dinamika elit dalam proses demokratisasi di Asia Tenggara.

B. Implikasi pada Konsep Presidensialisme di Negara Berkembang

Peran Jokowi sebagai 'king maker' juga memiliki implikasi penting terhadap pemahaman kita tentang presidensialisme di negara berkembang. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi presidensial yang masih dalam proses konsolidasi, batas antara kekuasaan formal dan informal presiden seringkali kabur. Sebagaimana diargumentasikan oleh (Rishan, 2020), presidensialisme di Asia Tenggara seringkali menghasilkan "demokrasi yang didominasi" (*dominated democracy*) di mana presiden memiliki pengaruh yang melampaui kekuasaan konstitusionalnya. Fenomena ini menantang konsepsi klasik tentang checks and balances dalam sistem presidensial. Peran Jokowi dalam mempengaruhi proses suksesi menunjukkan bahwa kekuasaan presiden dapat melampaui batas-batas formal jabatannya, terutama dalam konteks politik yang masih sangat bergantung pada figur. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memikirkan ulang desain institusional sistem presidensial di negara berkembang untuk memastikan akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan yang efektif (Shafa, 2023).

C. Relevansi dengan Debat tentang Personalisasi Politik

Kasus Jokowi sebagai 'king maker' memiliki relevansi signifikan dengan debat kontemporer tentang personalisasi politik. Fenomena ini menegaskan argumen (Hallin & Mancini, 2016) tentang meningkatnya personalisasi politik di era media modern. Dalam konteks Indonesia, personalisasi politik tidak hanya termanifestasi dalam gaya kampanye yang berfokus pada figur, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan politik dan bahkan dalam dinamika suksesi kepemimpinan. Namun, kasus Indonesia juga menunjukkan nuansa yang lebih kompleks dalam personalisasi politik. Sebagaimana diargumentasikan oleh (Ridwan & Fatkhuri, 2023), personalisasi politik di Indonesia tidak selalu berarti pelemahan institusi demokrasi. Dalam beberapa kasus, figur politik yang kuat justru dapat menjadi katalis untuk reformasi institusional. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami personalisasi politik dalam konteks sosio-kultural yang spesifik, di mana tradisi kepemimpinan kharismatik memiliki akar historis yang kuat.

Refleksi teoretis ini menunjukkan bahwa fenomena Jokowi sebagai 'king maker' tidak hanya relevan dalam konteks politik Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang dinamika demokrasi di negara berkembang secara lebih luas. Kasus ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih nuansir dalam memahami proses demokratisasi, yang mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor institusional, kultural, dan personal dalam membentuk lanskap politik suatu negara.

KESIMPULAN

Peran Jokowi sebagai 'king maker' dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024 memiliki implikasi signifikan terhadap konstelasi politik nasional dan kualitas demokrasi Indonesia. Strategi politik Jokowi yang pragmatis dan populis, fokusnya pada pembangunan infrastruktur, serta pengaruhnya yang kuat dalam dinamika partai politik telah mengubah lanskap politik Indonesia

secara fundamental. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas proses demokratisasi di negara berkembang, di mana personalisasi politik dan peran figur kuat masih sangat berpengaruh. Meskipun peran Jokowi sebagai 'king maker' dapat dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan, hal ini juga menimbulkan tantangan terhadap konsolidasi demokrasi, terutama dalam hal penguatan institusi dan sirkulasi elit. Kasus ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang dinamika demokrasi presidensial di negara berkembang dan menegaskan pentingnya memahami interaksi kompleks antara faktor institusional, kultural, dan personal dalam proses demokratisasi.

Saran

1. Penguatan independensi lembaga-lembaga negara, terutama yang terkait dengan proses elektoral, untuk menjaga integritas demokrasi.
2. Revitalisasi peran partai politik sebagai saluran aspirasi masyarakat dan wadah kaderisasi pemimpin untuk mengurangi ketergantungan pada figur tunggal.
3. Peningkatan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses politik untuk menjaga akuntabilitas pemerintah.
4. Reformasi sistem pemilu untuk memastikan kompetisi yang lebih adil dan representatif.
5. Pengembangan pendidikan politik yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
6. Penelitian lebih lanjut tentang dinamika personalisasi politik dalam konteks demokrasi berkembang untuk memahami implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin, F. (2023). Left-Right Spectrum and Democratic Backsliding: India, Indonesia, and the Philippines in Comparative Perspectives. *Jurnal Penelitian Politik*, *20*(1), 17–33. https://doi.org/10.14203/jpp.v20i1.1376

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press. https://books.google.co.id/books?id=dKNzDwAAQBAJ

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, *30*, 104–118. https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055

Asrinaldi, & Yusoff, M. A. (2023). Power consolidation and its impact on the decline of democracy in Indonesia under President Jokowi. *Cogent Social Sciences*, *9*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2232579

Dewa, T. Z. S., Sobari, W., & Pohan, I. A. (2020). Jokowi Effect Or Krisdayanti Effect ? An Analysis Of The Phenomenon Of Reverse Coattail Effect By Celebrity Politics In The 2019 Concurrent Election Efek Jokowi Atau Efek Krisdayanti ? Analisis Fenomena Efek Ekor Jas Terbalik Oleh Pesohor Politik Dalam Pe. *Journal of Politics and Policy*, *3*(1), 61–80. https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/35/31

Fairclough, N. (2019). *Critical Discourse Analysis "The Critical Stady of Language."*

Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2021). Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments. *Party Politics*, *28*, 135406882199248. https://doi.org/10.1177/1354068821992488

Gaines, D. (2023). *Qualitative Inquiry & Research Design by Creswell and Poth*.

Hadiz, V., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, *38*, 488–502. https://doi.org/10.1177/0192512117697475

Hallin, D., & Mancini, P. (2016). Ten Years After Comparing Media Systems : What Have We Learned? *Political Communication*, *34*, 1–17. https://doi.org/10.1080/10584609.2016.1233158

Kristal, D. (2021). the Comparison of Democratic (De)Consolidation: the Study of Democratic

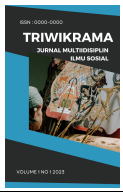

Regression in Indonesia and Philippines 2016-2020. *Jurnal Penelitian Politik*, *18*(2), 125–139. https://ejournal.politik.lipi.go.id/

Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, *91*, 261–282. https://doi.org/10.5509/2018912261

Negara, S. D. (2019). Jokowis second term: economic challenges and outlook. *Australian Strategic Policy Institute*, *145*(July), 1–16. https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2019-07/SI 145 Jokowis second term.pdf?lpcvggPjlul1.U1CFS1qmwlfjIik6Ska

Prayudi, P., & Sagita, V. A. (2021). News Construction of COVID's Crisis Management of Indonesian Government through Detik.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *19*(1), 93. https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.4503

Razita, S., Panji, M., & Santoso, T. (2024). *The Decline of Democracy in The South East Asian Region*. *3*(1), 1–9.

Ridwan, M. A., & Fatkhuri, F. (2023). Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, *5*(1), 1–16. https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.16789

Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia`. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(2), 219–240. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1

SAMUELS, D. (2002). Presidentialized PartiesThe Separation of Powers and Party Organization and Behavior. *Comparative Political Studies - COMP POLIT STUD*, *35*, 461–483. https://doi.org/10.1177/0010414002035004004

Schreier, M. (2011). Qualitative Research. Studying How Things Work, Robert E. Stake. Guilford Press, New York, NY (2010), 221 pages plus indices, ISBN: 978-1-60623-545-4. *Journal of Mathematical Psychology*, *55*, 399–400. https://doi.org/10.1016/j.jmp.2011.08.003

Shafa, K. T. (2023). Komparasi Kebijakan Pemerintah Masa Kepemimpinan Jokowi Periode Pertama dan Kedua Dilihat dari Teori Utilitarian. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *2*(1), 100–109.